



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 2 December 2025, Hal 140-149
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Strategi Unilever dalam Dinamika Politik Ekonomi Global Tahun 2023-2025: Adaptasi Korporasi Multinasional terhadap Kebijakan dan Kepentingan Negara

Fadilah Affwa^{1*}, Nasywa Aisyah Hilda Jannati², Shafa Kamila Khairunnisa³, Tiara Witaloka⁴, Septianis Afipah⁵

¹⁻⁵ Universitas Al-Ghfari, Indonesia

email: fadilahaffwa@gmail.com¹

Article Info :

Received:
28-10-2025
Revised:
25-11-2025
Accepted:
26-12-2025

Abstract

This study examines Unilever's strategic responses to global political economy dynamics during the 2023-2025 period by positioning multinational corporations as non-state actors that interact directly with state policies and national interests. The research adopts a qualitative descriptive-analytical approach, drawing on secondary data sources including official corporate reports, state policy documents, and scholarly literature on international political economy. The findings indicate that geopolitical fragmentation, the strengthening of national policy frameworks, and the politicization of energy, food security, and labor issues have collectively shaped the strategic environment influencing Unilever's decision-making processes. In response, the company has implemented supply chain diversification, reinforced local production capacities, ensured compliance with national regulations, and strategically managed its relationships with government institutions. The study further reveals that Unilever does not merely adapt to state policies but also contributes to shaping global governance practices and international standards. These findings underscore the necessity of employing a political economy approach to analyze multinational corporate strategies in order to comprehensively understand power relations, national interests, and evolving global dynamics.

Keywords: Corporate Strategy, Global Political Economy, International Political Economy, Multinational Corporations, State Policy.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis strategi Unilever dalam menghadapi dinamika politik ekonomi global pada periode 2023–2025 dengan menempatkan korporasi multinasional sebagai aktor non-negara yang berinteraksi langsung dengan kebijakan dan kepentingan negara. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan sumber data sekunder berupa laporan resmi perusahaan, dokumen kebijakan negara, serta literatur ekonomi politik internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fragmentasi geopolitik, penguatan kebijakan nasional, serta politisasi isu energi, pangan, dan ketenagakerjaan membentuk lingkungan strategis yang memengaruhi pengambilan keputusan Unilever. Perusahaan merespons kondisi tersebut melalui diversifikasi rantai pasok, penguatan produksi lokal, kepatuhan terhadap regulasi nasional, dan pengelolaan hubungan strategis dengan pemerintah. Temuan penelitian juga mengungkapkan bahwa Unilever tidak hanya beradaptasi terhadap kebijakan negara, tetapi turut berperan dalam membentuk praktik tata kelola dan standar global. Penelitian ini menegaskan bahwa analisis strategi korporasi multinasional memerlukan pendekatan ekonomi politik untuk memahami relasi kekuasaan, kepentingan nasional, dan dinamika global secara komprehensif.

Kata kunci: Ekonomi Politik Global, Multinasional, Kebijakan Negara, Politik Ekonomi Internasional, Strategi Korporasi.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Periode 2023-2025 menunjukkan intensifikasi relasi antara aktivitas korporasi multinasional dan konfigurasi politik ekonomi global yang ditandai oleh meningkatnya fragmentasi perdagangan, penguatan kebijakan industri nasional, serta eskalasi ketegangan geopolitik lintas kawasan. Korporasi multinasional tidak lagi hanya beroperasi dalam logika efisiensi pasar, melainkan harus menavigasi kepentingan negara, tekanan regulasi, serta tuntutan legitimasi politik di berbagai yurisdiksi, sebagaimana dijelaskan dalam kajian ekonomi politik kontemporer (Sumual, 2025; Candra et al., 2025).

Dalam kondisi tersebut, Unilever sebagai salah satu perusahaan multinasional terbesar di sektor barang konsumsi cepat saji menghadapi kompleksitas adaptasi strategis yang tidak terpisahkan dari dinamika kebijakan publik global dan nasional.

Strategi bisnis Unilever mengalami pergeseran signifikan dari orientasi ekspansi pasar menuju pendekatan yang lebih politis, terutama melalui kepatuhan regulatif, pengelolaan risiko geopolitik, dan diplomasi korporasi. Fenomena ini memperlihatkan keterkaitan erat antara praktik bisnis global dan struktur kekuasaan internasional sebagaimana diuraikan dalam literatur bisnis internasional dan ekonomi politik global (Augustie et al., 2025; Purrohman et al., 2025). Perubahan lanskap politik global yang dipengaruhi konflik Rusia-Ukraina, rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok, serta penguatan blok perdagangan regional telah berdampak langsung terhadap strategi rantai pasok dan kebijakan investasi korporasi multinasional. Negara-negara semakin aktif menggunakan instrumen politik ekonomi seperti tarif, standar lingkungan, dan kebijakan energi sebagai alat perlindungan kepentingan nasional, yang memengaruhi keberlanjutan operasi perusahaan global (Nabilah, 2025; Prawira, 2025).

Unilever harus menyesuaikan kebijakan produksi dan distribusi dengan regulasi yang berbeda di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara berkembang, terutama terkait isu keberlanjutan, energi terbarukan, dan standar ketenagakerjaan. Dinamika tersebut menuntut kepemimpinan bisnis global yang adaptif terhadap ketidakstabilan politik dan perubahan kebijakan lintas negara (Mulyani et al., 2025). Strategi Unilever pada fase ini tidak dapat dilepaskan dari upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan korporasi dan tuntutan politik negara tempat perusahaan beroperasi. Dimensi sumber daya manusia internasional juga mengalami transformasi sebagai konsekuensi dari dinamika politik ekonomi global yang semakin kompleks. Kebijakan ketenagakerjaan nasional, regulasi migrasi tenaga kerja, serta tuntutan standar hak asasi manusia global memengaruhi strategi pengelolaan SDM Unilever di berbagai wilayah operasional. Perusahaan multinasional dituntut untuk mengintegrasikan kepentingan negara tuan rumah dengan strategi korporasi global dalam pengelolaan tenaga kerja lintas budaya dan sistem hukum (Setiawan et al., 2025).

Unilever merespons tantangan ini melalui kebijakan kerja fleksibel global, standar etika tenaga kerja, serta pelibatan pemangku kepentingan lokal sebagai bagian dari legitimasi politik perusahaan. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa strategi korporasi tidak berdiri netral, melainkan terikat pada struktur politik dan sosial yang membentuk lingkungan bisnis global. Tekanan kebijakan lingkungan global, terutama dari Uni Eropa dan negara-negara maju, mendorong Unilever untuk menyesuaikan strategi produksinya terhadap standar keberlanjutan yang bersifat politis dan normatif. Kebijakan seperti Renewable Energy Directive II dan regulasi emisi karbon menjadi instrumen politik ekonomi yang memengaruhi struktur biaya dan strategi investasi perusahaan multinasional (Saniyah, 2024). Adaptasi Unilever terhadap kebijakan tersebut mencerminkan praktik diplomasi korporasi dalam merespons kepentingan negara sekaligus menjaga daya saing global. Pemasaran global Unilever juga mengalami transformasi dengan penekanan pada narasi keberlanjutan yang sejalan dengan agenda politik lingkungan internasional (Faisal et al., 2025). Relasi ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran tidak lagi semata-mata ekonomi, tetapi berkelindan dengan kepentingan politik dan regulatif global:

Tabel 1. Indikator Politik Ekonomi Global yang Mempengaruhi Strategi Unilever (2023-2025)

Indikator Global	Data Utama
Pendapatan Unilever Global 2023	€59,6 miliar
Negara Operasional Unilever	>190 negara
Pertumbuhan Perdagangan Global 2024	±1,7%
Kontribusi UE terhadap Regulasi Lingkungan Global	>30% standar lingkungan global

Sumber: World Trade Organization 2023-2025

Data tersebut menunjukkan bahwa strategi Unilever tidak dapat dipisahkan dari struktur politik ekonomi global yang memengaruhi arus perdagangan, regulasi lingkungan, dan legitimasi operasional perusahaan multinasional. Skala operasi Unilever yang mencakup lebih dari 190 negara menempatkan perusahaan ini pada posisi strategis sebagai aktor non-negara dalam sistem ekonomi global. Perusahaan

harus menavigasi kepentingan politik negara maju dan berkembang yang sering kali memiliki orientasi kebijakan berbeda terhadap perdagangan dan investasi asing. Kondisi ini menegaskan bahwa keputusan strategis Unilever bersifat politis karena berinteraksi langsung dengan kebijakan nasional dan rezim internasional (Purrohman et al., 2025).

Hubungan tersebut memperlihatkan keterkaitan antara globalisasi ekonomi dan kekuasaan politik sebagaimana dianalisis dalam perspektif ekonomi politik. Asia dan kawasan Indo-Pasifik, kebijakan ekonomi Amerika Serikat dan mitra strategisnya turut memengaruhi strategi ekspansi dan investasi Unilever. Inisiatif Free and Open Indo-Pacific memperlihatkan bagaimana kepentingan nasional negara besar membentuk arsitektur ekonomi regional yang berdampak pada korporasi multinasional (Prawira, 2025). Unilever merespons dinamika ini melalui diversifikasi pasar, penguatan basis produksi regional, dan penyesuaian strategi distribusi. Kebijakan tersebut sekaligus mencerminkan kemampuan korporasi untuk membaca arah politik internasional dalam pengambilan keputusan bisnis. Strategi ini memperlihatkan bahwa adaptasi korporasi multinasional berlangsung dalam arena politik global yang sarat kepentingan negara.

Kerja sama ekonomi regional seperti IK-CEPA juga menjadi faktor penting dalam strategi Unilever di negara berkembang, termasuk Indonesia. Perjanjian perdagangan tersebut membuka peluang sekaligus tantangan bagi perusahaan multinasional dalam mengelola kepentingan ekonomi dan politik negara mitra (Kalauw, 2025). Unilever memanfaatkan rezim perdagangan regional untuk memperkuat posisi pasar sekaligus menyesuaikan kebijakan lokal agar selaras dengan regulasi nasional. Interaksi ini menunjukkan bahwa korporasi multinasional tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga aktor yang bernegosiasi dengan negara. Dinamika tersebut mempertegas peran strategis Unilever dalam politik ekonomi internasional.

Berdasarkan paparan tersebut, kajian mengenai strategi Unilever dalam dinamika politik ekonomi global periode 2023-2025 memiliki relevansi akademik dan praktis yang kuat. Pendekatan politik ekonomi memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap relasi antara kepentingan korporasi, kebijakan negara, dan struktur kekuasaan global. Studi ini berkontribusi pada pengembangan literatur bisnis internasional, geopolitik ekonomi, dan manajemen strategis global sebagaimana dikemukakan oleh Augustie et al. (2025) dan Estede et al. (2025). Pemahaman terhadap strategi Unilever sebagai aktor non-negara memberikan perspektif baru mengenai peran korporasi dalam tatanan global kontemporer. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan bagaimana adaptasi korporasi multinasional berlangsung di tengah tarik-menarik kepentingan politik dan ekonomi internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi Unilever dalam merespons dinamika politik ekonomi global periode 2023-2025. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan interaksi kompleks antara kebijakan negara, kepentingan politik internasional, dan strategi korporasi multinasional secara kontekstual dan komprehensif. Data penelitian bersumber dari data sekunder yang meliputi laporan tahunan dan keberlanjutan Unilever, dokumen kebijakan perdagangan dan lingkungan internasional, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan ekonomi politik global dan bisnis internasional. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan penelusuran sistematis terhadap buku, jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, serta dokumen resmi pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Data yang terkumpul dianalisis untuk mengidentifikasi pola adaptasi strategis Unilever terhadap perubahan kebijakan dan kepentingan negara dalam sistem ekonomi global (Augustie et al., 2025).

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik melalui proses reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi untuk menemukan hubungan antara dinamika politik global dan strategi korporasi Unilever. Penelitian ini memanfaatkan perspektif ekonomi politik internasional dan manajemen strategis global sebagai kerangka analisis guna menjelaskan posisi Unilever sebagai aktor non-negara dalam struktur kekuasaan global. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari laporan korporasi, literatur akademik, dan dokumen kebijakan internasional agar memperoleh gambaran yang konsisten dan kredibel. Interpretasi hasil penelitian dilakukan secara kritis dengan mengaitkan temuan empiris terhadap teori dan konsep yang relevan dalam studi geopolitik dan kepemimpinan bisnis global. Metode ini diharapkan mampu menghasilkan

analisis yang akurat mengenai adaptasi strategi Unilever di tengah dinamika politik ekonomi global yang terus berkembang (Mulyani et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Unilever dalam Merespons Fragmentasi Politik Ekonomi Global

Fragmentasi politik ekonomi global pada periode 2023–2025 ditandai oleh meningkatnya kebijakan proteksionisme, regionalisasi perdagangan, dan politisasi rantai pasok global yang berdampak langsung terhadap operasional korporasi multinasional. Unilever sebagai perusahaan dengan jaringan produksi lintas kawasan harus merumuskan strategi yang mempertimbangkan relasi kekuasaan antarnegara serta kepentingan nasional yang semakin dominan. Dinamika ini memperlihatkan bahwa pasar global tidak lagi bersifat netral, melainkan dibentuk oleh preferensi politik dan kebijakan strategis negara. Dalam kerangka ekonomi politik internasional, korporasi multinasional berperan sebagai aktor yang bernegosiasi dengan negara, bukan sekadar pelaku ekonomi pasif (Djirimu & Tombolotutu, 2023). Strategi Unilever pada fase ini mencerminkan penyesuaian terhadap struktur politik global yang semakin terfragmentasi.

Ketegangan geopolitik di Asia Timur dan Indo-Pasifik turut memengaruhi stabilitas jalur distribusi dan akses bahan baku strategis yang digunakan Unilever. Rivalitas kekuatan besar di kawasan tersebut mendorong negara-negara memperketat kontrol terhadap perdagangan dan investasi asing. Unilever merespons kondisi ini dengan mendiversifikasi basis produksi dan memperkuat rantai pasok regional untuk mengurangi ketergantungan pada satu kawasan tertentu. Langkah ini sejalan dengan dinamika politik internasional Asia Timur yang sarat dengan kepentingan keamanan dan ekonomi negara besar (Pramono et al., 2025). Adaptasi tersebut menunjukkan keterkaitan erat antara strategi korporasi dan konfigurasi geopolitik kawasan.

Kebijakan luar negeri China dan implikasinya terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara turut menciptakan ketidakpastian ekonomi yang berdampak pada korporasi multinasional. Ketegangan di Laut China Selatan memengaruhi iklim investasi dan jalur perdagangan internasional yang strategis bagi perusahaan global. Unilever menyesuaikan strategi operasionalnya melalui manajemen risiko geopolitik dan peningkatan kerja sama dengan mitra lokal. Pendekatan ini mencerminkan upaya perusahaan dalam membaca arah kebijakan luar negeri negara besar yang berpengaruh terhadap stabilitas regional (Khairulsah, 2025). Posisi Unilever berada dalam persimpangan kepentingan ekonomi dan politik kawasan.

Di tingkat global kecenderungan negara-negara untuk memperkuat kebijakan industri nasional membentuk tantangan baru bagi perusahaan multinasional. Regulasi terkait konten lokal, standar produksi, dan perlindungan industri domestik menjadi instrumen politik ekonomi yang semakin menonjol. Unilever menyesuaikan portofolio produknya dengan karakteristik kebijakan nasional untuk menjaga keberlanjutan pasar. Strategi ini memperlihatkan bahwa adaptasi korporasi tidak hanya berbasis efisiensi ekonomi, tetapi juga kalkulasi politik. Fenomena ini sesuai dengan analisis dialektika negara dan ketergantungan dalam ekonomi politik kontemporer (Wicaksono & Wanusmawati, 2025).

Kebijakan energi dan standar emisi global turut memengaruhi struktur biaya dan strategi produksi Unilever. Negara-negara menggunakan kebijakan lingkungan sebagai alat politik ekonomi untuk mengarahkan perilaku korporasi multinasional. Unilever merespons melalui investasi pada teknologi ramah lingkungan dan penyesuaian proses produksi agar selaras dengan standar internasional. Langkah tersebut mencerminkan adaptasi strategis terhadap kebijakan negara yang memiliki dimensi politik dan ekonomi sekaligus. Dinamika ini sejalan dengan kajian historis ekonomi politik kebijakan energi dan standar emisi (Qadir, 2025).

Perubahan kebijakan subsidi energi di berbagai negara juga berimplikasi terhadap biaya produksi dan harga produk konsumen. Negara sering kali menggunakan subsidi energi sebagai instrumen politik untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Unilever harus menyesuaikan strategi harga dan distribusi produk agar tetap kompetitif di tengah fluktuasi kebijakan energi. Strategi tersebut memperlihatkan keterkaitan antara kepentingan elite politik dan kesejahteraan masyarakat dalam kebijakan energi nasional (Putri et al., 2025). Korporasi multinasional berada dalam posisi adaptif terhadap dinamika tersebut.

Isu ketahanan pangan global menjadi faktor penting dalam strategi Unilever, terutama di negara berkembang. Negara semakin aktif dalam mengatur pasokan pangan sebagai bagian dari kepentingan nasional. Unilever menyesuaikan rantai pasok bahan baku pertanian dengan kebijakan pangan nasional

untuk menjaga kontinuitas produksi. Langkah ini menunjukkan peran perusahaan dalam sistem ekonomi politik ketahanan pangan nasional. Analisis ini sejalan dengan kajian mengenai peran negara dalam menghadapi krisis pangan (Viona et al., 2025). Keanggotaan Indonesia dalam BRICS juga membawa implikasi terhadap dinamika pasar tenaga kerja dan proteksionisme regional. Kebijakan migrasi tenaga kerja dan perlindungan industri domestik memengaruhi strategi SDM korporasi multinasional. Unilever menyesuaikan kebijakan ketenagakerjaan dengan regulasi nasional dan regional yang berkembang. Strategi ini mencerminkan adaptasi terhadap ekonomi politik migrasi dan tenaga kerja. Fenomena tersebut sejalan dengan analisis strategis keanggotaan BRICS dalam perspektif ekonomi politik (Sari & Ningsih, 2025).

Keterlibatan Unilever dalam berbagai yurisdiksi menuntut kemampuan membaca dinamika politik domestik setiap negara. Kebijakan publik sering kali dipengaruhi oleh kepentingan elite politik dan tekanan global. Unilever mengelola hubungan dengan pemerintah sebagai bagian dari strategi mempertahankan akses pasar. Pendekatan ini menunjukkan praktik diplomasi korporasi dalam arena politik ekonomi global. Hal tersebut relevan dengan kajian strategi dan kebijakan publik dalam dinamika politik nasional (Imamia et al., 2025). Strategi Unilever pada sub-bahasan ini memperlihatkan bahwa korporasi multinasional beroperasi dalam struktur politik ekonomi yang kompleks dan dinamis. Keputusan bisnis tidak terlepas dari konfigurasi kepentingan negara dan relasi kekuasaan internasional. Unilever memosisikan diri sebagai aktor adaptif yang mampu membaca arah kebijakan global. Strategi tersebut menegaskan keterkaitan erat antara ekonomi dan politik dalam praktik bisnis global. Analisis ini menguatkan perspektif ekonomi politik internasional dalam memahami strategi korporasi (Djirimu & Tombolotutu, 2023).

Adaptasi Unilever terhadap Kebijakan Nasional dan Regional Negara Tujuan Operasi

Kebijakan nasional tujuan operasi Unilever memainkan peran signifikan dalam membentuk arah strategi perusahaan. Negara semakin aktif menggunakan regulasi investasi, perdagangan, dan industri sebagai instrumen perlindungan kepentingan nasional. Unilever merespons kondisi ini melalui penyesuaian struktur investasi dan kerja sama dengan mitra lokal. Strategi tersebut menunjukkan bahwa negara tetap memiliki peran sentral dalam mengatur aktivitas korporasi multinasional. Fenomena ini sejalan dengan kajian ekonomi politik hubungan negara dan pasar (Wicaksono & Wanusmawatie, 2025).

Di Indonesia, kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Unilever. Regulasi ini mendorong perusahaan untuk memperkuat basis produksi lokal dan rantai pasok domestik. Unilever menyesuaikan strategi produksi dengan memperluas kemitraan dengan industri lokal. Langkah tersebut memperlihatkan adaptasi terhadap kebijakan nasional yang bernuansa politik ekonomi. Kebijakan ini mencerminkan dialektika antara kemandirian ekonomi dan ketergantungan global (Wicaksono & Wanusmawatie, 2025). Kebijakan investasi strategis Indonesia pada sektor sumber daya alam juga berdampak tidak langsung terhadap iklim bisnis korporasi multinasional. Penerimaan investasi asing di sektor nikel mencerminkan upaya negara memperkuat posisi tawar dalam ekonomi global. Unilever harus menyesuaikan strategi pasokan bahan baku dengan kebijakan hilirisasi nasional. Pendekatan ini menunjukkan sensitivitas perusahaan terhadap arah kebijakan ekonomi politik domestik. Analisis ini sejalan dengan kajian kebijakan investasi Indonesia (Laudya, 2025).

Kebijakan luar negeri Indonesia yang adaptif di era globalisasi turut memengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Posisi Indonesia dalam diplomasi internasional menciptakan iklim yang relatif kondusif bagi investasi asing. Unilever memanfaatkan stabilitas tersebut untuk memperkuat pangsa pasar domestik. Strategi ini menunjukkan keterkaitan antara kebijakan luar negeri dan aktivitas korporasi multinasional. Dinamika ini sejalan dengan kajian politik luar negeri Indonesia (Suherry et al., 2025). Regulasi ketenagakerjaan nasional menjadi faktor penting dalam strategi operasional Unilever. Negara menggunakan kebijakan tenaga kerja sebagai instrumen politik untuk melindungi kepentingan domestik. Unilever menyesuaikan kebijakan SDM agar selaras dengan regulasi nasional dan standar internasional. Pendekatan ini mencerminkan adaptasi terhadap ekonomi politik tenaga kerja. Fenomena tersebut relevan dengan kajian ekonomi politik migrasi dan proteksionisme tenaga kerja (Sari & Ningsih, 2025):

Tabel 2. Indikator Kebijakan Nasional dan Regional yang Mempengaruhi Strategi Unilever

Indikator Kebijakan	Data Utama
Kontribusi Produksi Lokal Unilever Indonesia 2024	>95% kebutuhan domestik
Investasi Unilever Indonesia Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Rp8 triliun Rata-rata 70%
Jumlah Tenaga Kerja Lokal	>6.000 pekerja

Sumber: Laporan Unilever Indonesia 2024

Data tersebut menunjukkan tingkat adaptasi Unilever terhadap kebijakan nasional yang bersifat strategis dan politis. Dominasi produksi lokal mencerminkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi industri domestik. Investasi yang signifikan memperlihatkan komitmen jangka panjang Unilever terhadap pasar nasional. Strategi ini menempatkan perusahaan dalam relasi saling bergantung dengan negara. Pola ini memperkuat analisis ekonomi politik mengenai interaksi negara dan korporasi (Djirimu & Tombolotutu, 2023). Kebijakan regional juga memengaruhi strategi Unilever, terutama dalam kerangka kerja sama ekonomi internasional. Perjanjian perdagangan regional membuka akses pasar sekaligus menetapkan standar regulasi tertentu. Unilever menyesuaikan strategi distribusi dengan ketentuan regional yang berlaku. Pendekatan ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membaca dinamika kebijakan regional. Analisis tersebut sejalan dengan kajian politik internasional Asia Timur (Pramono et al., 2025).

Ketahanan pangan regional menjadi isu strategis yang memengaruhi kebijakan negara dan aktivitas korporasi. Negara menggunakan regulasi pangan untuk menjaga stabilitas domestik. Unilever menyesuaikan rantai pasok pangan dengan kebijakan tersebut. Langkah ini mencerminkan keterlibatan perusahaan dalam sistem pangan nasional. Analisis ini sejalan dengan kajian ekonomi politik ketahanan pangan (Viona et al., 2025). Perubahan kebijakan energi regional juga berdampak terhadap biaya produksi Unilever. Negara menggunakan kebijakan energi sebagai alat politik ekonomi. Unilever merespons melalui efisiensi energi dan inovasi produksi. Strategi ini menunjukkan adaptasi terhadap kebijakan publik yang dinamis. Fenomena tersebut relevan dengan kajian subsidi energi (Putri et al., 2025). Adaptasi Unilever terhadap kebijakan nasional dan regional menunjukkan hubungan timbal balik antara negara dan korporasi. Strategi perusahaan dibentuk oleh struktur kebijakan publik yang berlaku. Unilever menempatkan diri sebagai aktor yang patuh dan adaptif. Pendekatan ini memperlihatkan praktik ekonomi politik dalam bisnis global. Analisis ini memperkuat pemahaman mengenai peran negara dalam ekonomi global (Imamia et al., 2025).

Posisi Unilever sebagai Aktor Non-Negara dalam Politik Ekonomi Global

Dalam konfigurasi politik ekonomi global kontemporer, Unilever menempati posisi strategis sebagai aktor non-negara yang memiliki kapasitas memengaruhi arah kebijakan ekonomi dan sosial di berbagai negara. Skala operasi lintas negara menjadikan perusahaan ini tidak hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai bagian dari arsitektur tata kelola global. Unilever berinteraksi secara intensif dengan pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Relasi tersebut mencerminkan pergeseran peran korporasi multinasional dari sekadar pelaku pasar menjadi aktor politik ekonomi. Perspektif ini sejalan dengan analisis ekonomi politik internasional yang menempatkan korporasi sebagai elemen penting dalam sistem global (Djirimu & Tombolotutu, 2023).

Sebagai aktor non-negara, Unilever memiliki kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan internalnya dengan agenda publik yang dirumuskan negara. Perusahaan tidak berada di luar struktur kekuasaan, melainkan berinteraksi secara dinamis dengan institusi negara. Hubungan ini membentuk pola saling memengaruhi antara kebijakan publik dan strategi korporasi. Dalam banyak kasus, negara memanfaatkan keberadaan korporasi multinasional untuk mendukung agenda pembangunan nasional. Relasi ini menunjukkan praktik ekonomi politik yang bersifat timbal balik antara negara dan korporasi (Imamia et al., 2025).

Keterlibatan Unilever dalam dialog kebijakan publik memperlihatkan bagaimana perusahaan memposisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah. Dialog ini mencakup isu ketenagakerjaan,

lingkungan, ketahanan pangan, dan investasi. Unilever menyampaikan kepentingannya melalui mekanisme formal dan informal yang diakui dalam sistem kebijakan nasional. Praktik tersebut memperlihatkan legitimasi politik korporasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Fenomena ini menguatkan pandangan bahwa korporasi multinasional berperan aktif dalam arena kebijakan (Imamia et al., 2025). Dalam isu energi dan lingkungan, Unilever berperan sebagai aktor yang mendukung agenda keberlanjutan global yang dipromosikan negara dan organisasi internasional. Perusahaan menyesuaikan standar produksi dengan regulasi lingkungan yang bersifat politis dan normatif. Langkah ini memperkuat citra Unilever sebagai mitra kebijakan dalam transisi energi dan pengendalian emisi. Negara memanfaatkan komitmen korporasi untuk mempercepat pencapaian target kebijakan lingkungan. Dinamika ini relevan dengan analisis ekonomi politik kebijakan energi dan standar emisi (Qadir, 2025).

Peran Unilever dalam isu ketahanan pangan juga menunjukkan dimensi politik dari aktivitas korporasi. Perusahaan terlibat dalam pengelolaan rantai pasok pangan yang berhubungan langsung dengan stabilitas nasional. Negara memandang keberlanjutan pasokan pangan sebagai bagian dari kepentingan strategis. Unilever menyesuaikan strategi bisnisnya dengan kebijakan pangan nasional dan regional. Analisis ini sejalan dengan kajian ekonomi politik ketahanan pangan yang menekankan peran negara dan aktor non-negara (Viona et al., 2025). Unilever harus membaca dinamika kebijakan luar negeri negara-negara besar yang memengaruhi stabilitas ekonomi regional. Ketegangan geopolitik berdampak pada iklim investasi dan arus perdagangan internasional. Unilever merespons dengan strategi mitigasi risiko geopolitik dan penyesuaian jaringan distribusi. Langkah ini memperlihatkan sensitivitas politik dalam pengambilan keputusan bisnis. Analisis tersebut sejalan dengan kajian politik internasional di Asia Timur (Pramono et al., 2025).

Sebagai aktor non-negara, Unilever juga berperan dalam dinamika pasar tenaga kerja global. Kebijakan migrasi tenaga kerja dan proteksionisme nasional memengaruhi strategi sumber daya manusia perusahaan. Unilever menyesuaikan kebijakan ketenagakerjaan dengan regulasi domestik dan regional. Strategi ini memperlihatkan keseimbangan antara kepentingan efisiensi global dan tuntutan politik nasional. Fenomena ini relevan dengan analisis ekonomi politik migrasi tenaga kerja (Sari & Ningsih, 2025). Hubungan Unilever dengan negara juga dipengaruhi oleh kebijakan subsidi energi dan kebijakan fiskal. Negara menggunakan subsidi sebagai instrumen politik untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Perubahan kebijakan subsidi berdampak langsung pada struktur biaya produksi perusahaan. Unilever merespons dengan strategi efisiensi dan inovasi. Dinamika ini mencerminkan interaksi kepentingan elite politik dan kesejahteraan publik dalam kebijakan energi (Putri et al., 2025).

Dalam isu investasi strategis, Unilever beroperasi dalam kerangka kebijakan nasional yang bertujuan memperkuat posisi tawar negara di ekonomi global. Negara mengarahkan investasi asing untuk mendukung agenda industrialisasi dan hilirisasi. Unilever menyesuaikan strategi ekspansi dengan prioritas nasional tersebut. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas politik korporasi dalam merespons kebijakan negara. Analisis ini sejalan dengan kajian kebijakan investasi nasional (Laudya, 2025). Kebijakan luar negeri Indonesia yang adaptif di era globalisasi menciptakan ruang manuver bagi korporasi multinasional. Stabilitas politik dan diplomasi ekonomi memberikan kepastian bagi aktivitas bisnis. Unilever memanfaatkan kondisi tersebut untuk memperkuat kehadiran pasar domestik. Relasi ini mencerminkan sinergi antara kebijakan luar negeri dan aktivitas ekonomi. Analisis tersebut relevan dengan kajian politik luar negeri Indonesia (Suherry et al., 2025).

Sebagai aktor non-negara, Unilever juga berperan dalam membentuk norma dan standar global. Perusahaan mengadopsi praktik tata kelola yang diakui secara internasional. Langkah ini memperkuat legitimasi politik dan sosial perusahaan di berbagai negara. Negara sering mengadopsi standar tersebut sebagai referensi kebijakan nasional. Fenomena ini menunjukkan pengaruh korporasi dalam pembentukan tata kelola global (Djirimu & Tombolotutu, 2023). Keterlibatan Unilever dalam inisiatif global memperlihatkan transformasi peran korporasi dalam sistem internasional. Perusahaan tidak hanya mengikuti aturan, tetapi turut berkontribusi dalam perumusan norma. Posisi ini memperkuat status Unilever sebagai aktor non-negara yang berpengaruh. Negara memanfaatkan keahlian korporasi untuk mencapai tujuan kebijakan. Relasi ini memperlihatkan interdependensi antara negara dan korporasi.

Dalam dinamika politik domestik, Unilever harus menyesuaikan strategi komunikasi publiknya. Opini publik dan tekanan sosial memengaruhi kebijakan pemerintah terhadap korporasi. Unilever mengelola citra perusahaan melalui program sosial dan keberlanjutan. Strategi ini memperkuat

legitimasi sosial perusahaan. Fenomena tersebut sejalan dengan analisis kebijakan publik dan politik domestik (Imamia et al., 2025). Ketergantungan negara terhadap investasi dan teknologi korporasi menciptakan ruang tawar bagi Unilever. Perusahaan memiliki kapasitas untuk memengaruhi kebijakan melalui kontribusi ekonomi. Relasi ini membentuk pola negosiasi antara kepentingan nasional dan kepentingan korporasi. Unilever memanfaatkan posisi ini secara strategis. Analisis ini relevan dengan konsep dialektika negara dan ketergantungan dalam ekonomi politik (Wicaksono & Wanusmawatie, 2025).

Unilever berkontribusi terhadap stabilitas sistem ekonomi internasional melalui keberlanjutan operasionalnya. Aktivitas perusahaan memengaruhi lapangan kerja, pasokan barang, dan stabilitas harga. Negara memandang korporasi sebagai bagian dari infrastruktur ekonomi. Posisi ini memperkuat peran Unilever sebagai aktor non-negara. Analisis ini sejalan dengan perspektif ekonomi politik internasional (Djirimu & Tombolotutu, 2023). Perubahan politik global menuntut Unilever untuk terus menyesuaikan strategi jangka panjangnya. Perusahaan membaca arah kebijakan negara dan dinamika geopolitik. Strategi ini menunjukkan kemampuan adaptif korporasi dalam sistem yang tidak stabil. Negara dan korporasi saling bergantung dalam menjaga stabilitas ekonomi. Fenomena ini mencerminkan dinamika politik ekonomi global kontemporer (Pramono et al., 2025). Unilever juga berperan dalam mendorong transformasi kebijakan melalui praktik terbaik global. Negara sering menjadikan praktik korporasi sebagai rujukan reformasi kebijakan. Perusahaan memperoleh legitimasi dari pengakuan tersebut. Relasi ini memperlihatkan pertukaran kepentingan antara negara dan korporasi. Analisis ini relevan dengan kajian kebijakan publik dan strategi politik (Imamia et al., 2025).

Sebagai aktor non-negara, Unilever tidak terlepas dari kritik terhadap dominasi korporasi dalam ekonomi global. Negara harus menjaga keseimbangan antara menarik investasi dan melindungi kepentingan publik. Unilever menyesuaikan strategi dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Langkah ini memperkuat kepercayaan publik terhadap perusahaan. Dinamika ini mencerminkan kompleksitas hubungan negara dan korporasi. Relasi Unilever dengan negara berkembang memperlihatkan tantangan ekonomi politik yang khas. Negara membutuhkan investasi dan lapangan kerja, sementara korporasi membutuhkan stabilitas kebijakan.

Unilever menavigasi kepentingan tersebut melalui strategi adaptif. Pola ini menciptakan hubungan saling ketergantungan. Analisis ini sejalan dengan kajian ekonomi politik pembangunan (Djirimu & Tombolotutu, 2023). Posisi Unilever sebagai aktor non-negara dalam politik ekonomi global menunjukkan transformasi peran korporasi multinasional. Perusahaan tidak hanya mengikuti dinamika politik, tetapi turut membentuknya. Strategi Unilever mencerminkan kemampuan membaca kepentingan negara dan struktur kekuasaan global. Pendekatan ini menegaskan relevansi analisis ekonomi politik dalam studi korporasi multinasional. Sub-bahasan ini memperkaya pemahaman mengenai interaksi negara dan aktor non-negara dalam sistem global kontemporer.

KESIMPULAN

strategi Unilever dalam periode 2023–2025 tidak dapat dipahami semata-mata sebagai respons bisnis terhadap dinamika pasar global, melainkan sebagai proses adaptasi yang berkelindan erat dengan konfigurasi politik ekonomi internasional. Fragmentasi geopolitik, penguatan kebijakan nasional, serta politisasi isu energi, pangan, dan ketenagakerjaan membentuk lingkungan strategis yang menuntut korporasi multinasional untuk menyesuaikan pola operasional dan pengambilan keputusan. Unilever merespons kondisi tersebut melalui diversifikasi rantai pasok, penyesuaian kebijakan produksi lokal, serta penguatan hubungan dengan negara sebagai pemegang otoritas kebijakan. Strategi ini memperlihatkan bahwa kepentingan korporasi dan kepentingan negara tidak selalu berada dalam posisi yang berseberangan, tetapi sering kali membentuk relasi saling bergantung. Temuan ini menegaskan relevansi pendekatan ekonomi politik dalam menganalisis perilaku dan strategi korporasi multinasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Selain itu, pembahasan juga mengungkapkan posisi Unilever sebagai aktor non-negara yang memiliki kapasitas signifikan dalam memengaruhi dan merespons kebijakan publik di berbagai tingkat. Keterlibatan perusahaan dalam dialog kebijakan, penerapan standar global, serta kontribusi terhadap agenda keberlanjutan dan ketahanan pangan menunjukkan peran korporasi yang melampaui fungsi ekonomi semata. Relasi Unilever dengan negara berkembang dan negara maju memperlihatkan pola negosiasi yang dipengaruhi oleh kepentingan nasional, stabilitas politik, dan kebutuhan pembangunan ekonomi. Unilever tidak hanya beradaptasi terhadap kebijakan dan kepentingan negara, tetapi juga turut membentuk dinamika politik ekonomi

global melalui praktik operasional dan tata kelola perusahaan. Kesimpulan ini menempatkan korporasi multinasional sebagai elemen penting dalam struktur kekuasaan global yang patut dikaji secara kritis dalam studi hubungan internasional dan ekonomi politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Augustie, C., Propheto, A., Judijanto, L., Adiputra, I., Maulida, M., Syakur, A. K. A., ... & Mariani, M. (2025). *Bisnis Internasional: Teori Komprehensif dan Perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Candra, M., Clodya, F., & Sarlini, H. (2025). Peran Globalisasi Dalam Membentuk Dinamika Ekonomi Nasional: Perspektif Ekonomi Politik. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15669437>
- Djirimu, M. A., & Tombolotutu, A. D. (2023). *Dinamika Ekonomi Politik Internasional*. Deepublish.
- Estede, S., Anom, L., Rahayu, S., Rochmayanti, D., Mazidah, N., Bisri, H., ... & Effasa, A. S. (2025). *MANAJEMEN DINAMIS: Adaptasi dan Strategi Global*. PENERBIT KBM INDONESIA.
- Faisal, A., Kurniawati, K., & Sepriano, S. (2025). *Buku Referensi Pemasaran Global*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Imamia, A., Zehro, A. I., Sjarif, E. I., Rizkiyah, T., Jennah, R., & Rusdani, Z. (2025). *Strategi Dan Kebijakan Publik Dalam Dinamika Politik Indonesia*. Penerbit: Kramantara JS.
- Kalauw, S. M. (2025). *Analisis Dampak Kerjasama Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) Terhadap Peningkatan Ekonomi Politik Internasional Indonesia Tahun 2020-2023* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong).
- Khairulsah, K. (2025). Dampak Kebijakan Luar Negeri China Di Laut China Selatan Terhadap Stabilitas Politik Dan Keamanan Kawasan Asia Tenggara Tahun 2020-2023. *Diplomacy and Global Security Journal: Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional*, 2(1), 87-98. <https://doi.org/10.36859/dgsj.v2i1.3493>
- Laudya, P. G. (2025). *Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menerima Investasi Nikel dari China pada Tahun 2020-2023* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Mulyani, H., Rachmawati, D., Anam, A., & Anshori, M. I. (2025). Geopolitik Dan Kepemimpinan Bisnis Global: Dampak Ketidakstabilan Politik Terhadap Kepemimpinan Global. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 9(2), 789-797. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v9i2.1865>
- Nabilah, T. (2025). *Determinan Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat dalam Merespons Agresi Militer Rusia Terhadap Ukraina Tahun 2022-2024* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Pramono, S., Hartati, A. Y., Purwanto, A. J., & Raharjo, W. A. (2025). *Politik Internasional di Asia Timur*. Cahya Ghani Recovery.
- Prawira, A. (2025). Kepentingan Nasional Amerika Serikat Di Kawasan Indo-Pasifik Melalui Inisiatif Free And Open Indo-Pacific Pada Tahun 2023-2024. *Diplomacy and Global Security Journal: Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional*, 2(1), 236-252. <https://doi.org/10.36859/dgsj.v2i1.3500>
- Purrohman, P. S., Ruslan, A., Lidiaputri, H., & Azizah, Z. N. (2025). *Dinamika perdagangan internasional dan transformasi ekonomi global*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Putri, W., Fadhillah, S. N., & Monika, D. (2025). Peran Ekonomi Politik Subsidi Energi: Antara Kepentingan Elite Dan Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan dan Ekonomi*, 8(2), 331-338. <https://doi.org/10.33627/pk.v8i2.3471>
- Qadir, S. (2025). *Dinamika Ekonomi Politik Historis Dalam Kebijakan Bahan Bakar Minyak Dan Penerapan Standar Emisi Euro 4 Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).
- Saniyah, I. (2024). *Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Menghadapi Kebijakan Renewable Energy Directive II Uni Eropa Tahun 2018-2023* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong).
- Sari, D. F., & Ningsih, W. O. J. (2025). Analisis Strategis Keanggotaan Indonesia dalam BRICS terhadap Migrasi dan Proteksionisme Tenaga Kerja: Tinjauan Ekonomi Politik Migrasi. *Global and Policy Journal of International Relations*, 13(01). <https://doi.org/10.33005/jgp.v13i01.5119>

- Setiawan, H., Indah, D. Y., & Baihaqi, M. I. (2025). *Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional: Strategi, Tantangan dan Dinamika Global*. Star Digital Publishing.
- Suherry, A. H., Arfa, D., Azwan, R. I., Juneva, D. M. P., Barus, F. P. M. A., & Fadilla, S. N. (2025). *Politik Luar Negeri Indonesia di Era Globalisasi: Dinamika, Tantangan, dan Peluang*. CV. AZKA PUSTAKA.
- Sumual, L. P., & SE, M. (2025). EKONOMI, SOSIAL, POLITIK. *Pengantar Bisnis*, 35.
- Viona, M., Nabila, N., Katanging, D. G., & Candra, M. (2025). Ekonomi Politik Ketahanan Pangan di Indonesia: Peran Negara Dalam Menghadapi Krisis Pangan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15613605>
- Wicaksono, P. A., & Wanusmawati, I. (2025). Dialektika Negara dan Ketergantungan: Analisis Ekonomi Politik pada Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Indonesia. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(3), 207-220. <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v5i3.701>